

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulanan 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Persentase	100	100	98,33	98,33
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar	Persentase	100	100	118	118
II	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara	Persentase	100	100	100	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis	Persentase	100	100	100	100
III	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4 dari 4	120

	Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan					
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Persentase	85	85	100	118

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas.
2. Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase

Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas

Latar Belakang

Persentase Pencapaian Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kontribusi sub-sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan industrialisasi, terutama hilirisasi sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas dipandang strategis karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB pada RPJMN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 20,8%. Industri pengolahan terdiri dari 16 subsektor, salah satunya sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas. Dengan memperhitungkan target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB, maka ditentukan target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,8-2%.

Indikator Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas mengukur persentase capaian aktual dari realisasi rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas yang ditetapkan RPJMN untuk tahun 2025.

Adapun realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas}}{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,8-2%, berdasarkan penghitungan mandiri dari *cascading* target rasio PDB Industri Pengolahan yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Target kinerja didasarkan

pada pencapaian target rasio tersebut, sehingga target untuk triwulanan sama dengan target tahunan.

Hingga triwulan IV tahun 2025, rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas mencapai 1,77%* dari target tahun 2025 sebesar 1,8-2%. Sehingga capaian kinerja triwulan IV tahun 2025 telah mencapai sebesar 98,33% ($1,77/1,8 \times 100\%$) dari target tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub- Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Persentase	100	98,33	98,33% (Memuaskan)

*)berdasarkan data BPS terakhir yang dipublikasikan untuk periode triwulan III tahun 2025

Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas merupakan *cascading direct* dari Indikator Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,5-3%. Upaya pencapaian target tersebut difokuskan pada percepatan proyek gasifikasi batubara menjadi DME dan metanol guna meningkatkan *economic viability* melalui dukungan kebijakan insentif fiskal, penyediaan infrastruktur pendukung, serta penguatan kepastian regulasi.

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor batubara dan pengilangan migas hingga Triwulan IV Tahun 2025 (berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik/BPS triwulan III) tercatat sebesar 1,77%, atau masih sedikit di bawah target tahunan sebesar 1,8%. Meskipun demikian, kinerja tersebut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan berlanjutnya efektivitas implementasi kebijakan hilirisasi dalam mendorong aktivitas pengolahan di dalam negeri serta peningkatan kontribusi sub-sektor batubara dan pengilangan migas terhadap PDB nasional.

Secara keseluruhan, capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya pergeseran struktur ekonomi menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam bernilai tambah telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to methanol</i> dan <i>coal to DME</i>)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025 dengan hasil diperlukan kejelasan status proyek gasifikasi batubara di Tanjung Enim, seiring sedang diusulkannya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, serta diperlukan kebijakan terkait pengaturan royalti batubara untuk mendukung program hilirisasi.
2	Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to methanol</i>)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025 dengan hasil sedang dilakukan kajian mengenai jalur hilirisasi yang optimal dan impor teknologi guna mendukung proyek gasifikasi batubara di Tanjung Enim. Untuk proyek gasifikasi batubara di Kutai Timur akan dilakukan <i>groundbreaking</i> pada kuartal III tahun 2026 dan <i>Commercial Operation Date</i> pada tahun 2028
3	Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to DME</i>)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025 dengan hasil sedang dilakukan kajian mengenai jalur hilirisasi yang optimal dan impor teknologi guna mendukung proyek gasifikasi batubara di Tanjung Enim. Untuk proyek gasifikasi batubara di Kutai Timur akan dilakukan <i>groundbreaking</i> pada kuartal III tahun 2026 dan <i>Commercial Operation Date</i> pada tahun 2028

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Menghadiri FGD Penyusunan Kebijakan Tentang Uji Tuntas HAM Nasional Cakupan Indikator Lingkungan dan Perubahan Iklim pada tanggal 6 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Persiapan OECD Economic Survey Indonesia 2026 pada tanggal 6 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Pembahasan Konsep Permendag Tata Cara HPE Emas dan Batubara pada tanggal 10 Oktober 2025
- Menghadiri Capacity Building Workshop IRENA Socio-economic Impact Model for Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2025
- Menghadiri FGD Uji Tuntas HAM Nasional Cakupan Indikator Serikat Pekerja pada tanggal 16 Oktober 2025
- Menghadiri FGD Uji Tuntas HAM Nasional Cakupan Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tanggal 17 Oktober 2025
- Menghadiri Forum Hukum BUMN Pertambangan (FHBP) II pada tanggal 28 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Pembahasan Draf Term of Reference (TOR) OECD Economic Survey of Indonesia 2026 pada tanggal 30 Oktober 2025
- Menghadiri Diskusi dan Pelatihan Bioenergi untuk Ketahanan Energi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan pada tanggal 31 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Internalisasi Perpres No 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
- Menghadiri Rakortek Pembahasan Rencana Aksi K/L dalam rangka Implementasi Perpres 94 Tahun 2025 pada tanggal 5 November 2025
- Menghadiri Stakeholder Consultation Study Toward Green and Clean Captive Power in Indonesia pada tanggal 20 November 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti *Zoom* untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut telah dialokasikan untuk menyelenggarakan kegiatan tambahan untuk koordinasi teknis percepatan pengembangan gasifikasi batubara pada triwulan IV tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu, harga produk hilirisasi batubara seperti DME belum kompetitif dibandingkan dengan produk LPG, sehingga masih belum tercapai operasional produksi penuh (komersil) yang diperlukan untuk mendongkrak kontribusi subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB. Selain itu, alokasi anggaran untuk subsidi DME mencapai Rp123 triliun (asumsi substitusi dari LPG ke DME 100%) atau Rp41 triliun lebih besar dibandingkan dengan subsidi LPG saat ini sebesar Rp82 triliun. Atas kendala tersebut, mengakibatkan masih belum tercapainya operasional produksi penuh/optimal yang diperlukan untuk mendongkrak kontribusi industri pengolahan subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB. Di samping itu, dari sisi *Environmental, Social, and Governance* (ESG), proses gasifikasi batubara masih dihadapkan pada ketidakjelasan penerapan teknologi *carbon capture, utilization, and*

storage (CCUS) yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko lingkungan dalam jangka panjang serta dapat mengurangi daya tarik investasi, terlebih di tengah tren global yang semakin mendorong penerapan teknologi rendah emisi pada industri berbasis batubara.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2026 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan BPI Danantara, PT BA, dan Pertamina untuk segera menghitung biaya investasi yang dibutuhkan dan melakukan peninjauan terhadap potential investor bagi proyek DME termasuk untuk alih teknologi dan SDM.
2. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pengalokasian subsidi yang dibutuhkan agar harga jual DME di masyarakat tidak jauh berbeda dengan LPG.
3. Koordinasi lanjutan percepatan pengembangan proyek-proyek hilirisasi batubara yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), agar segera memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dalam negeri dan PDB nasional.
4. Koordinasi lanjutan kebijakan insentif dan dukungan pasar, terutama untuk meningkatkan daya saing produk hilirisasi seperti DME dan metanol di pasar domestik.
5. Koordinasi lanjutan percepatan penyelesaian perizinan, sinkronisasi kebijakan, dan pemanfaatan forum koordinasi yang ada untuk mendukung kelancaran implementasi proyek hilirisasi batubara, di antaranya dengan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional dan BPI Danantara sebagai *off-taker* potensial produk DME.
6. Koordinasi kajian penerapan ESG dalam proyek gasifikasi batubara dengan K/L terkait, pelaku industri, dan akademisi.

**1.2. Persentase
Pencapaian Rasio
PDB Industri
Pengolahan Sub-
Sektor Industri
Logam Dasar**

Latar Belakang

Persentase Pencapaian Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Subsektor Industri Logam Dasar merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kontribusi sub-sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan industrialisasi, terutama hilirisasi sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Sub-sektor industri logam dasar dipandang strategis karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB pada RPJMN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 20,8%. Industri pengolahan terdiri dari 16 subsektor, salah satunya sub-sektor industri logam dasar. Dengan memperhitungkan target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB, maka ditentukan target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 0,7-1%.

Indikator Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Logam Dasar mengukur persentase capaian aktual dari realisasi rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar yang ditetapkan RPJMN untuk tahun 2025.

Adapun realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Logam Dasar}}{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Logam Dasar}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 0,7-1%, berdasarkan penghitungan mandiri dari *cascading* target rasio PDB Industri Pengolahan yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Target kinerja didasarkan pada pencapaian target rasio tersebut, sehingga target untuk triwulanan sama dengan target tahunan.

Pada triwulan IV tahun 2025, rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar telah terealisasi sebesar 1,18%* dari target tahun 2025 sebesar 0,7-1%. Sehingga capaian kinerja triwulan IV tahun 2025 telah mencapai sebesar 118% ($1,14/1,00 \times 100\%$) dari target tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-	Persentase	100	118	118 % (Memuaskan)

Sektor Industri Logam Dasar				
-----------------------------	--	--	--	--

*)berdasarkan data BPS terakhir yang dipublikasikan untuk periode triwulan III tahun 2025

Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar merupakan *cascading direct* dari Indikator Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,5-3%. Fokus utama untuk mencapai target rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Logam Dasar diarahkan pada pengembangan hilirisasi nikel (melalui pengembangan baterai kendaraan listrik), timah (melalui pengembangan timah solder dan logam tanah jarang dalam mineral ikutan timah), bauksit (melalui pengembangan aluminium), dan tembaga (melalui pengembangan katoda tembaga).

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB pada Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebesar 1,18%, yang menunjukkan bahwa target tahunan sebesar 0,7–1% telah tercapai dan terlampaui. Kinerja tersebut mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan hilirisasi dalam mendorong peningkatan aktivitas pengolahan di dalam negeri serta memperkuat kontribusi sub-sektor industri logam dasar terhadap PDB nasional.

Kapasitas smelter pengolahan nikel pada triwulan IV mencapai 36,22 juta ton, melampaui target 2025 sebesar 33,64 juta ton. Capaian tersebut didorong terutama oleh kontribusi smelter nikel pyro sebesar 22,89 juta ton sebagai tulang punggung pengolahan hulu. Selain itu, nikel hydro berkontribusi 3,46 juta ton, mencerminkan mulai berimbangnya teknologi pemrosesan nikel. Produksi hilirisasi nikel elektrolisis masih relatif kecil sebesar 0,12 juta ton, namun menunjukkan arah penguatan produk bernilai tambah. Sementara itu, produksi stainless steel serta slab, billet, HRC, dan CRC mencapai 9,76 juta ton yang menegaskan pendalaman hilirisasi nikel di dalam negeri.

Sedangkan, kapasitas smelter bauksit pada triwulan IV mencapai 7,00 juta ton, lebih tinggi dibandingkan target 2025 yang ditetapkan sebesar 6,27 juta ton. Produk hilir berupa alumina mendominasi dengan capaian 6,30 juta ton, mencerminkan penguatan basis bahan baku industri aluminium nasional. Produk hilir berupa aluminium ingot berkontribusi sebesar 0,48 juta ton sebagai produk antara utama. Sementara itu, aluminium billet mencapai 0,09 juta ton yang mendukung kebutuhan industri manufaktur hilir. Produksi aluminium profil, rod, wire, dan foil sebesar 0,14 juta ton menunjukkan peningkatan diversifikasi produk aluminium bernilai tambah.

Untuk kapasitas smelter tembaga pada triwulan IV mencapai 735 ribu ton, dan masih berada di bawah target 2025 sebesar 1.195 ribu ton. Hasil produk hilir berupa katoda tembaga sebesar 325 ribu ton sebagai komponen utama rantai pasok tembaga. Selain itu, tembaga foil mencapai 50 ribu ton yang memiliki peran strategis bagi industri elektronik dan baterai. Produksi tembaga rod dan wire relatif tinggi, yakni 360 ribu ton, mencerminkan kuatnya permintaan sektor

kelistrikan dan manufaktur. Secara keseluruhan, kinerja ini menunjukkan fondasi hilirisasi tembaga telah terbentuk namun masih memerlukan percepatan kapasitas.

Selain itu, untuk kapasitas smelter timah pada triwulan IV tercatat sebesar 134,3 ribu ton, hampir mencapai target 2025 sebesar 142,1 ribu ton. Hasil produk hilir berupa timah ingot mencapai 8,40 ribu ton sebagai produk dasar pengolahan timah. Sementara itu, timah solder dan anode solder mendominasi dengan capaian 125,9 ribu ton. Hilirisasi nikel menunjukkan orientasi industri timah nasional yang kuat pada produk antara dan hilir. Kinerja tersebut mengindikasikan industri timah Indonesia semakin terarah pada peningkatan nilai tambah dan pemenuhan kebutuhan industri domestik.

Secara keseluruhan, capaian rasio tersebut mengindikasikan bahwa upaya pergeseran struktur ekonomi menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam bernilai tambah telah berjalan sesuai dengan arah dan target kebijakan yang ditetapkan. Dampak lanjutan yang dihasilkan antara lain peningkatan nilai tambah domestik, penguatan substitusi impor, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 ini menjadi landasan penting bagi pencapaian target tahunan serta konsistensi pelaksanaan agenda transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi industri pertambangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan hilirisasi mineral (nikel, timah, bauksit, dan tembaga)	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan Rapat Studi Hilirisasi Nikel dengan Prospera pada tanggal 6 Oktober 2025 dengan hasil Bahwa berdasarkan <i>London Metal Exchange</i> (LME) tren harga nikel cenderung menurun dan kondisi di dalam negeri sedang mengalami <i>over capacity</i>. Dengan kondisi <i>over capacity</i> tersebutnya akan mendorong industri untuk lebih condong memproduksi NPI/ Nikel kadar rendah dikarenakan adanya <i>spread</i> yang cukup besar untuk nikel kadar

			<p>rendah. Salah satu penyebab dari <i>over capacity</i> dan menurunnya harga nikel adalah adanya <i>anti dumping duty</i> dari Pemerintah China terhadap sekitar 20% baja tahan karat dari Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan Rapat Pendalaman Gap-Analysis ESG atas beberapa parameter pada tanggal 7-9 Oktober dan 20-22 Oktober 2025 dengan hasil ditemukan 159 regulasi yang ada di Indonesia terkait ESG• Telah dilaksanakan Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel dengan APNI pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan hasil bahwa pada produksi hulu Nikel saat ini, cadangan Saprolite ore Indonesia akan habis diperkirakan 6 tahun lagi, sementara untuk Limonite ore akan habis pada 13 tahun ke depan. Menurunnya eksplorasi Nikel di Indonesia dan menurunnya konversi dari sumber daya Nikel menjadi cadangan Nikel disebabkan oleh berbagai hal diantaranya perubahan pemberian RKAB dari setiap 3 tahun menjadi pertahun, adanya permasalahan lahan, kurangnya koordinasi antar instansi Pemerintah sehingga menimbulkan ketidakjelasan kebijakan.• Telah dilaksanakan Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel dengan FINI pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan hasil bahwa permasalahan pada industri antara (<i>midstream</i>) produk olahan Nikel adalah terdapat kebijakan pada PP 28/2025 dan Permenperin 37/2025 yang mengamanatkan adanya integrasi perizinan melalui sistem OSS. Pelaku usaha masih kesulitan dalam pelaksanaan integrasi ini. Lebih lanjut, pada PP 28/2025 diamanatkan
--	--	--	--

			<p>penghentian pemberian izin IUI untuk pengolahan NPI/Ferronickel dan MHP supaya lebih fokus kepada produksi hilir nya (NPI/Ferronickel, dan MHP merupakan produk antara/<i>intermediate</i> dan dianggap sudah <i>overcapacity</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Finalisasi Policy Brief Baterai Listrik Nasional pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan hasil terlaksananya diskusi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung penyusunan Policy Brief yang diinisiasi Prof. Bambang Sudarmanta (ITS), yang merumuskan gagasannya dalam kerangka kebijakan terpadu THIO+E (Technoware, Humanware, Infoware, Orgaware, dan Environment) yang menekankan percepatan adopsi kendaraan listrik, penguatan kapasitas industri dan SDM, tata kelola dan insentif yang terintegrasi, serta penerapan ekonomi sirkular melalui daur ulang baterai, guna mendukung target Net Zero Emission 2060 dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi baterai hijau di Asia. • Telah dilaksanakan Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel dengan IISIA pada tanggal 3 November 2025 dengan hasil bahwa kapasitas industri <i>stainless steel</i> masih stagnan dengan hanya sedikit penambahan sejak tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya skema perdagangan yang dirasa kurang adil untuk pelaku usaha domestik, kurangnya <i>transfer knowledge</i> maupun <i>transfer technology</i> dari perusahaan asing yang bekerjasama atau berinvestasi di Indonesia, serta kebutuhan/<i>demand</i>
--	--	--	---

			<p>domestik untuk usaha manufaktur stainless steel juga masih rendah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan <i>Discussion on Evaluation of Nickel Downstreaming</i> pada tanggal 10 November 2025 dengan hasil bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Shanghai Metals Market (SMM), bahwa overcapacity saat ini terjadi untuk produk <i>refined nickel</i>. Indonesia perlu menyusun strategi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan saat ini.• Telah dilaksanakan Diskusi EV dengan Clean Air Asia pada tanggal 10 November 2025 dengan hasil diskusi mengenai rencana penyusunan studi terkait perkembangan dan arah strategis program Drive Electric Indonesia sebagai upaya percepatan transisi transportasi menuju kendaraan listrik. Diskusi menyoroti peran kendaraan listrik lintas segmen—khususnya roda dua dan angkutan umum—dalam menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas udara perkotaan, sekaligus pentingnya kesiapan ekosistem pendukung seperti infrastruktur pengisian, pembiayaan, kapasitas SDM, dan pengelolaan baterai bekas yang berwawasan lingkungan. Melalui paparan hasil kajian dan rekomendasi kebijakan, Clean Air Asia dan ViriyaENB menegaskan perlunya kolaborasi multi-pemangku kepentingan, penguatan advokasi dengan sektor swasta, serta penyusunan peta jalan dan standar lingkungan baterai, yang diperkaya dengan masukan pemerintah terkait indikator dampak ekonomi, literasi teknis, dan
--	--	--	--

			<p>harmonisasi kebijakan untuk mendukung target emisi nol bersih Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan Rapat Laporan Akhir Kajian Integrasi Rantai Pasok Baterai untuk Transisi Energi di Indonesia pada tanggal 24 November 2025 dengan hasil baterai jenis LFP menunjukkan tren demand yang meningkat, sehingga ketergantungan pada impor lithium dan mangan menjadi isu strategis yang harus segera diatasi melalui pengembangan rantai pasok domestik atau diversifikasi sumber.• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pengecualian Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas Smelter yang telah Tahap Konstruksi pada tanggal 24 November 2025 dengan hasil bahwa diperlukan persyaratan yang jelas serta verifikasi terhadap klaim Perusahaan Smelter Nikel yang sudah masuk dalam tahap konstruksi pasca ditetapkannya PP 28/2025.• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengecualian Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas Smelter yang telah Tahap Konstruksi pada tanggal 25 November 2025 dengan hasil bahwa untuk Perusahaan yang telah melakukan konstruksi, perlu menyampaikan dokumen berupa NIB, Izin Lingkungan, KKPR, dan PBG untuk membuktikan bahwa Perusahaan memang sudah dalam tahap konstruksi, adapun batas waktu untuk memenuhi persyaratan dasar sebelum 5 Oktober 2025. Selain itu, Perusahaan juga diharapkan menyampaikan pernyataan bahwa akan menyelesaikan konstruksi smelter dalam 3 tahun. Batas
--	--	--	--

		<p>waktu penyampaian dokumen adalah 1 Desember 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Smelter yang mendapat Perizinan Berusaha untuk memproduksi NPI, FeNI, Nickel Matte, dan MHP pada tanggal 4 Desember 2025 dengan hasil yaitu i) Memberikan Izin Usaha Industri (IUI) kepada 13 (tiga belas) smelter yang telah memenuhi persyaratan dasar dan membuat Surat Pernyataan Komitmen Penyelesaian Konstruksi paling lama 3 (tahun); ii) Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan komitmen pelaku usaha dalam menyelesaikan konstruksi paling lama 3 (tiga) tahun; iii) dan untuk smelter yang belum memenuhi persyaratan dasar namun merupakan satu kesatuan rantai pasok akan dibahas lebih lanjut untuk menentukan pemberian diskresi perizinan berusahanya. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemberian Diskresi atas Smelter memproduksi NPI, FeNI, Nickel Matte, dan MHP yang merupakan Satu Kesatuan Ekosistem Rantai Pasok Grup Perusahaan pada tanggal 5 Desember 2025 dengan hasil Rapat merupakan pembahasan khusus untuk CNGR group sebagai salah satu perusahaan yang mengusulkan untuk mendapatkan pengecualian dari PP 28/2025 karena merupakan satu kesatuan rantai pasok. Saat ini CNGR memiliki 6 line produksi dan 4 diantaranya diproduksi dan dipergunakan untuk keperluan perusahaan/
--	--	--

		<p>domestik. Namun pemberian pengecualian belum dapat diberikan karena CNGR diharapkan mampu memberikan penjelasan lebih detil untuk membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang diusulkan merupakan satu kesatuan rantai pasok, serta penjelasan lebih lanjut dan detail seperti pohon industri rantai pasok yang jela serta data kapasitas produksi dari masing-masing entitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan FGD Perspektif Kebijakan dan Industri - Analisis Prospek Pengolahan dan Manufaktur Baterai Berkelanjutan di Indonesia pada tanggal 8 Desember 2025 dengan hasil diseminasi temuan awal studi tim Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) dan KADIN mengenai posisi dan arah pengembangan industri baterai nasional. Kegiatan yang mempertemukan perwakilan pemerintah, industri, asosiasi, BUMN, dan lembaga riset untuk mendiskusikan tantangan dan peluang hilirisasi baterai EV ini membahas berbagai hal, mulai dari dominasi Indonesia di hulu rantai pasok mineral, kebutuhan penguatan segmen midstream-downstream, hingga pentingnya penyalarsan kebijakan lintas sektor, penerapan standar keberlanjutan (ESG), pengembangan teknologi rendah emisi, serta dukungan pembiayaan hijau, sebagai landasan memperkuat daya saing dan keberlanjutan ekosistem baterai Indonesia. • Telah dilaksanakan Rapat Progres Gap-Analysis dan Penyusunan Draft Panduan ESG pada tanggal 10 Desember 2025 dengan hasil regulasi terkait ESG di
--	--	--

			<p>Indonesia hanya memenuhi 35% s.d. 48% kesesuaian dengan standar ESG Internasional, sehingga mempengaruhi daya saing dan akseptibilitas produk mineral Indonesia di pasar global.</p> <ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pemberian Diskresi atas Smelter yang memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang merupakan Satu Kesatuan Ekosistem Rantai Pasok Grup Perusahaan pada tanggal 22 Desember 2025 dengan hasil yaitu i) CNGR menyampaikan bahwa terdapat 7 smelter yang diusulkan untuk mendapatkan pengecualian; ii) CNGR diharapkan memberikan penjelasan tambahan terkait entitas kepemilikan perusahaan; iii) Penjelasan besaran produksi yang akan di olah dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk mengubah MHP ke Nikel Sulfat.• Telah dilaksanakan Rapat Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel pada tanggal 22 Desember 2025 dengan hasil bahwa saat ini terdapat sengketa perdagangan Indonesia dengan EU salah satunya DS592 terkait larangan ekspor Nikel. Dibutuhkan strategi yang tepat untuk ini supaya tidak berimbas kepada komoditas Indonesia lainnya. Pada rapat sebelumnya sudah disepakati untuk dilakukan kajian bersama terkait hal ini.• Telah dilaksanakan Rapat Relaksasi Pemberlakuan Ketentuan PP No. 28 Tahun 2025 untuk Proyek Pengembangan Ekosistem Industri EV Battery Terintegrasi pada tanggal 30 Desember 2025 dengan hasil pemberian diskresi bagi PT
--	--	--	--

			<p>Feni Haltim dapat dilakukan melalui skema pemenuhan persyaratan dasar sesuai PP No. 5 Tahun 2021 sedangkan untuk PT Nickel Cobalt Halmahera dapat dilakukan melalui skema penugasan pemerintah sepanjang terdapat dasar hukum yang jelas.</p>
2	<p>Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan industri baterai kendaraan listrik</p>	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan limbah baterai ke Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tanggal 23-24 Desember 2025 dengan hasil proses daur ulang baterai sangat dipengaruhi oleh jenis dan komposisi baterai, di mana setiap tipe baterai memerlukan formula treatment yang berbeda. Untuk baterai berbasis NCM (Nickel Cobalt Manganese), teknologi dan referensi riset global telah relatif berkembang, terutama di negara seperti Tiongkok. Sementara itu, baterai LFP (Lithium Iron Phosphate) memiliki tantangan keekonomian yang signifikan karena nilai pemulihan material yang relatif rendah, sehingga belum menarik secara komersial tanpa dukungan kebijakan atau insentif.
3	<p>Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan logam tanah jarang</p>	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Pengembangan Tata Kelola Timah Nasional pada tanggal 16 Desember 2025 dengan hasil sisa hasil produksi Timah (Logam Tanah Jarang/<i>rare earth element</i>) memiliki nilai keekonomian yang masih cukup tinggi, namun belum memiliki regulasi tata kelolanya, Untuk itu, dibutuhkan sinkronisasi kebijakan terkait tata kelola timah secara keseluruhan, termasuk pengelolaan sisa hasil produksi timah.
4	<p>Monitoring dan evaluasi kebijakan</p>	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi

	pengembangan industri aluminium		Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat pada tanggal 19-20 Desember 2025 dengan hasil proyek SGAR Fase I telah siap beroperasi penuh, sedangkan SGAR Fase II masih membutuhkan penyelesaian infrastruktur logistik, kepastian pasokan listrik, pengelolaan tailing, pembebasan lahan, serta dukungan perizinan.
5	Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan industri katoda tembaga	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan utilisasi smelter tembaga pada tanggal 17 Oktober 2025 dengan hasil fasilitas smelter PT Smelting sudah memasuki tahap pengoperasian bertahap namun berhenti beroperasi dikarenakan kekurangan suplai bahan baku konsentrat tembaga akibat kecelakaan di tambang PT Freeport Indonesia, diperkirakan akan kembali beroperasi pada kuartal II 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Menghadiri Pertemuan terkait Berita Acara Serah Terima (BAST) *KONEKSI – Hibah Riset Electric Vehicle (EV) Mechanism* pada tanggal 8 Oktober 2025
- Menghadiri Capacity Building Workshop IRENA Socio-economic Impact Model for Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2025
- Menghadiri International Process Metallurgy Conference (IPMC) 2025 pada tanggal 14 Oktober 2025
- Menghadiri Workshop on Battery for Electric Vehicle & Energy Storage System pada tanggal 15 Oktober 2025
- Menghadiri FGD Uji Tuntas HAM Nasional Cakupan Indikator Serikat Pekerja pada tanggal 16 Oktober 2025
- Menghadiri FGD Uji Tuntas HAM Nasional Cakupan Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tanggal 17 Oktober 2025
- Menghadiri Diskusi Penentuan Standarisasi Emas di ITS Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2025
- Menghadiri Pertemuan Pengendalian Hibah Riset Electric Vehicle (EV) Program KONEKSI pada tanggal 21 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Deregulasi Pengaturan dan Kebijakan Ekspor pada tanggal 24 Oktober 2025
- Menghadiri Forum Hukum BUMN Pertambangan (FHBP) II pada tanggal 28 Oktober 2025

- Menghadiri Rapat Pembahasan Draf Term of Reference (TOR) OECD Economic Survey of Indonesia 2026 pada tanggal 30 Oktober 2025
- Menghadiri Diskusi dan Pelatihan Bioenergi untuk Ketahanan Energi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan pada tanggal 31 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Internalisasi Perpres No 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
- Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Tata Kelola Emas Nasional pada tanggal 4 November 2025
- Menghadiri Rakortek Pembahasan Rencana Aksi K/L dalam rangka Implementasi Perpres 94 Tahun 2025 pada tanggal 5 November 2025
- Rapat Koordinasi Kemajuan Implementasi Perpres 94 Tahun 2025 pada tanggal 26 November 2025
- Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Proyek Pemurnian Nikel Dalam Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik pada tanggal 5 Desember 2025
- Menghadiri Peluncuran Studi Captive Power: Transisi Energi Bersih pada Pembangkit Listrik Captive untuk Industri pada tanggal 17 Desember 2025
- Menghadiri Rapat HPE Produk Pertambangan Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar Periode II Bulan Desember 2025 pada tanggal 19 Desember 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan media komunikasi seperti *Zoom* untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut telah dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lanjutan pada triwulan IV tahun 2025 khususnya untuk isu terkait pembahasan pengecualian pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas smelter yang telah tahap konstruksi.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, meskipun target kinerja tercapai dan terlampaui terdapat beberapa isu yang perlu diselesaikan pada Tahun 2026, diantaranya sebagai berikut::

- Keterlambatan pembangunan fasilitas antara dan hilir seperti prekursor dan katoda, serta tekanan ekspor akibat isu bea anti-dumping, menghambat optimalisasi rantai hilirisasi nikel
- Kapasitas smelter bauksit/alumina belum memadai pasca larangan ekspor, sementara kebutuhan investasi dan energi yang tinggi membuat pembangunan smelter kurang diminati investor
- Smelter tembaga belum beroperasi dan kapasitas nasional belum sepenuhnya menyerap produksi konsentrat tembaga domestik, serta adanya tantangan teknis dan pembiayaan pada pembangunan smelter tembaga baru.
- Belum adanya kebijakan DMO/DPO dan regulasi tata niaga yang kurang adaptif pada logam timah dan produk turunan seperti solder timah, seperti pembatasan kadar Sn, bentuk kemasan, dan kewajiban transaksi melalui bursa yang meningkatkan biaya bahan baku.
- Pengembangan logam tanah jarang terkendala keterbatasan mitra strategis dan pasokan monasit yang rendah sehingga belum layak secara ekonomis untuk dikomersialisasikan

- Adanya isu pelaku usaha smelter *Rotary Kiln-Electric Furnace* (RKEF) kesulitan mendapatkan bahan baku biji nikel saprolite yang akan diolah hingga menjadi produk akhir berupa stainless steel dikarenakan harga bahan baku di pasaran yang tinggi
- Belum selarasnya regulasi nasional dengan beragam standar ESG global yang ada dalam praktik industri pengolahan dan pemurnian mineral. Saat ini pengaturan ESG di Indonesia tersebar dalam 139 peraturan K/L Pusat maupun Daerah

Berdasarkan isu yang ada tersebut, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2026 yaitu:

- Koordinasi lanjutan percepatan penyelesaian konstruksi fasilitas antara dan hilir, khususnya untuk produk prekursor, katoda, dan nikel sulfat, agar rantai pasok baterai kendaraan listrik dapat segera terintegrasi secara penuh.
- Koordinasi lanjutan percepatan pembangunan smelter bauksit/alumina melalui penyediaan skema pembiayaan kreatif dan insentif fiskal bagi investor, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti energi dan logistik.
- Koordinasi lanjutan akselerasi operasional penuh smelter tembaga yang telah terbangun dan memperluas kapasitas pemurnian melalui fasilitasi investasi baru, termasuk dukungan pada pembangunan fasilitas pengolahan lumpur anoda.
- Koordinasi lanjutan lintas sektor dan forum *debottlenecking* proyek strategis, guna mengatasi hambatan teknis dan regulasi yang memperlambat realisasi proyek hilirisasi logam dasar.
- Koordinasi penyelesaian permasalahan pada industri timah melalui (i) kajian kebijakan penerapan DMO atau DPO untuk logam timah, (ii) revisi Permendag 21/2024 agar adaptif dengan perkembangan pasar global saat ini, (iii) evaluasi tata niaga logam timah melalui bursa dengan mempertimbangkan kesinambungan antara hulu dan hilir industri timah agar produk hilir timah dalam negeri memiliki daya saing di pasar global, dan (iv) peta jalan pengembangan logam tanah jarang dan pembentukan badan pengumpul logam tanah jarang sebagai *offtaker*.
- Pelaksanaan studi evaluasi hilirisasi nikel di Indonesia
- Pelaksanaan studi *gap-analysis* standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) internasional di sektor hilirisasi pertambangan dengan regulasi terkait di Indonesia

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara.
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan, dengan dokumen keluaran berupa Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi, dengan dokumen keluaran berupa Notula Rapat Koordinasi Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan, dengan dokumen keluaran berupa Rumusan Perencanaan Program Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi, dengan dokumen keluaran berupa Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara.

Sedangkan realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 20\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara

% efektivitas SKP=% Tahapan Pertama+% Tahapan Kedua+% Tahapan Ketiga+% Tahapan Keempat

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2024 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja keasdepan. Adapun target triwulan IV 2025 sebesar 100%, berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2025 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan.

Hingga triwulan IV tahun 2025, persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara yang telah terealisasi sebesar 100% (keluaran berupa laporan hasil evaluasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara) atau mencapai 100% dari target triwulan IV tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara	Persentase	100	100	100 % (Memuaskan)

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara merupakan *cascading indirect* dari indikator Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3 dari 4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara pada triwulan IV tahun 2025 diantaranya berupa rapat serta monitoring dan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi yang di dalamnya termasuk pengembangan gasifikasi batubara khususnya pengembangan *coal-to-DME*.

Pengembangan industri *coal-to-DME* diarahkan untuk mendukung sasaran substitusi hingga 100 persen kebutuhan LPG nasional, dengan kapasitas produksi DME sebesar 8,1 juta ton per tahun yang setara dengan sekitar 6,2 juta ton LPG. Pencapaian kapasitas tersebut memerlukan pasokan bahan baku sekitar 28,8 juta ton batubara low-rank per tahun, sehingga sekaligus menjadi instrumen strategis dalam peningkatan nilai tambah batubara nasional yang selama ini memiliki keterbatasan daya saing di pasar global. Implementasi proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan devisa negara melalui penurunan impor LPG.

Pengembangan *coal-to-DME* direncanakan akan dibangun di 6 (enam) lokasi strategis, yaitu Muara Enim, Pali, dan Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera

Selatan; Tanah Bambu di Provinsi Kalimantan Selatan; Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur; serta Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara. Total kebutuhan investasi keenam proyek tersebut diperkirakan mencapai USD 10,25 miliar (sekitar Rp164 triliun).

Selain kontribusi terhadap ketahanan energi dan penghematan devisa, pengembangan *coal-to-DME* juga memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi regional. Pada tahap konstruksi, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja, sedangkan pada tahap operasi berpotensi menciptakan sekitar 45.000 tenaga kerja langsung dan 315.000 tenaga kerja tidak langsung, sehingga total peluang kerja mencapai sekitar 375.000 orang.

Berdasarkan hasil identifikasi, harga DME lebih mahal dari harga LPG, pada tahun 2023 harga LPG \$801/ton setara DME \$607, sedangkan perhitungan konsultan harga DME \$977/ton atau \$911–987/ton (proposal ECEC) sehingga penerapan DME masih sulit dilakukan karena perbedaan harganya yang cukup besar dengan LPG (sekitar USD 300/ton). Alternatif peningkatan nilai tambah batubara selain DME adalah coal-to-methanol yang dibutuhkan oleh industri biodiesel, yang saat ini masih bergantung pada impor. Alternatif lainnya adalah coal-to-syngas yang diperkirakan harganya akan sebanding dengan gas alam dalam 10 tahun ke depan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan Rapat Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui evaluasi usulan permohonan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Dewan Nasional KEK dan pembahasan terkait tarif royalti batubara untuk program hilirisasi

2	Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai <i>stakeholder</i> terkait skema rute hilirisasi dan penyediaan teknologi yang memadai guna mendukung proyek gasifikasi batubara di Tanjung Enim. Serta diperlukan upaya <i>debottlenecking</i> dan percepatan pelaksanaan pada proyek gasifikasi batubara di Kutai Timur guna memastikan penyelesaian proyek sesuai timeline yang di tetapkan yakni <i>Groundbreaking</i> pada kuartal III tahun 2026 dan <i>Commercial Operation Date</i> pada tahun 2028
---	--	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Menghadiri FGD Penyusunan Kebijakan Tentang Uji Tuntas HAM Nasional Cakupan Indikator Lingkungan dan Perubahan Iklim pada tanggal 6 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Persiapan OECD Economic Survey Indonesia 2026 pada tanggal 6 Oktober 2025
- Menghadiri Capacity Building Workshop IRENA Socio-economic Impact Model for Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2025
- Menghadiri FGD Uji Tuntas HAM Nasional Cakupan Indikator Serikat Pekerja pada tanggal 16 Oktober 2025
- Menghadiri FGD Uji Tuntas HAM Nasional Cakupan Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tanggal 17 Oktober 2025
- Menghadiri Forum Hukum BUMN Pertambangan (FHBP) II pada tanggal 28 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Pembahasan Draf Term of Reference (TOR) OECD Economic Survey of Indonesia 2026 pada tanggal 30 Oktober 2025
- Menghadiri Diskusi dan Pelatihan Bioenergi untuk Ketahanan Energi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan pada tanggal 31 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Internalisasi Perpres No 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
- Menghadiri Rakortek Pembahasan Rencana Aksi K/L dalam rangka Implementasi Perpres 94 Tahun 2025 pada tanggal 5 November 2025

- Menghadiri Stakeholder Consultation Study Toward Green and Clean Captive Power in Indonesia pada tanggal 20 November 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti *Zoom* untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut telah dialokasikan untuk menyelenggarakan kegiatan tambahan untuk koordinasi teknis percepatan pengembangan gasifikasi batubara pada triwulan IV tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum tersedia mekanisme pengendalian kebijakan yang terstruktur dan terintegrasi, yang diperlukan untuk memastikan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil rapat koordinasi serta konsistensi pelaksanaan komitmen kementerian/lembaga terkait dalam percepatan pengembangan gasifikasi batubara.
2. Keekonomian proyek coal-to-DME masih belum tercapai sehingga masih membutuhkan dukungan kebijakan maupun insentif lainnya. Selain itu dengan harga DME yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan LPG maka dampak alokasi anggaran untuk subsidi DME mencapai Rp123 triliun (asumsi substitusi dari LPG ke DME 100%) atau Rp41 triliun lebih besar dibandingkan dengan subsidi LPG sebesar Rp82 triliun.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2026 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi penyusunan rencana aksi percepatan pengembangan gasifikasi batubara untuk memastikan tindak lanjut atas kesepakatan dan komitmen kementerian/lembaga terkait.
2. Pelaksanaan upaya pada butir 1 (satu) di atas dapat diawali dari koordinasi penyusunan basis data bersama antar instansi, terutama data terkait pasokan batubara, kebutuhan infrastruktur pendukung untuk proyek gasifikasi batubara, serta perhitungan keekonomian yang optimal, agar perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat dan terarah.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait hilirisasi industri mineral kritis diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan, dengan dokumen keluaran berupa Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi, dengan dokumen keluaran berupa Notula Rapat Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan, dengan dokumen keluaran berupa Rumusan Perencanaan Program Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi, dengan dokumen keluaran berupa Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Sedangkan realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 10\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2024 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja keasdepan. Adapun target triwulan IV 2025 sebesar 100%, berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2025 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan.

Hingga triwulan IV tahun 2025, persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis yang telah terealisasi sebesar 100% (keluaran berupa Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis) atau mencapai 100% dari target triwulan IV tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis	Persentase	100	100	100 % (Memuaskan)

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis merupakan *cascading indirect* dari indikator Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3 dari 4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis pada triwulan IV 2025 diantaranya meliputi kegiatan evaluasi kebijakan hilirisasi nikel, di mana Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan menghimpun data dan informasi serta saran dan masukan dari pemangku kebijakan seperti Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) untuk perbaikan kebijakan hilirisasi nikel. Evaluasi kebijakan hilirisasi nikel perlu dilakukan mengingat cadangan saprolite ore Indonesia diperkirakan akan habis dalam 6 tahun ke depan, sementara untuk limonite ore akan habis pada 13 tahun ke depan.

Selain itu, kegiatan koordinasi juga dilakukan dalam rangka pengecualian pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas smelter yang telah tahap konstruksi dan diskresi atas smelter dengan produk NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang merupakan satu kesatuan ekosistem rantai pasok grup perusahaan. Kebijakan ini untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri. Prinsip *grandfather clause* menjadi dasar kebijakan ini, di mana ketentuan hukum yang memungkinkan individu atau entitas yang sudah ada sebelum aturan baru diberlakukan untuk terus beroperasi di bawah aturan lama.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan hilirisasi industri mineral kritis	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Studi Hilirisasi Nikel Dengan Prospera pada tanggal 6 Oktober 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui diskusi lanjutan yang akan membahas terkait dengan HPP Stainless dan diskusi dengan asosiasi untuk mendapatkan data serta informasi eksisting. • Telah dilaksanakan Rapat Pendalaman Gap-Analysis ESG atas beberapa parameter pada tanggal 7-9 Oktober dan 20-22 Oktober 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui analisis <i>regulatory gap</i> (regulasi di dalam negeri yang belum ada sesuai standar keberlanjutan global) dan <i>coverage gap</i> (regulasi di dalam negeri sudah ada namun belum setara standar keberlanjutan global) • Telah dilaksanakan Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel dengan APNI pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui diskusi dengan asosiasi dan <i>stakeholder</i> lainnya, serta adanya kajian lebih lanjut. • Telah dilaksanakan Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel dengan FINI pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan hasil

			<p>akan ditindaklanjuti melalui diskusi dengan asosiasi dan <i>stakeholder</i> lainnya, serta adanya kajian lebih lanjut.</p> <ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan Rapat Finalisasi Policy Brief Baterai Listrik Nasional pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui penyelesaian Policy Brief oleh tim peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), yang berfokus pada implementasi framework THIO-E (Technoware, Humanware, Infoware, Orgaware, dan Environment)• Telah dilaksanakan Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel dengan IISIA pada tanggal 3 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui diskusi dengan asosiasi dan <i>stakeholder</i> lainnya, serta adanya kajian lebih lanjut.• Telah dilaksanakan Discussion on Evaluation of Nickel <i>Downstreaming</i> pada tanggal 10 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui diskusi dengan asosiasi dan <i>stakeholder</i> lainnya, serta adanya kajian lebih lanjut.• Telah dilaksanakan Diskusi EV dengan Clean Air Asia pada tanggal 10 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui pendalaman kajian strategis untuk memperkuat basis kebijakan, antara lain melalui analisis dampak ekonomi pengembangan EV, kajian lanjutan hambatan adopsi di masyarakat, serta penelaahan standar pengelolaan limbah baterai
--	--	--	--

			<p>dan B3. Selain itu, akan disusun agenda FGD terarah dengan pemangku kepentingan kunci untuk memetakan isu dan opsi solusi kebijakan, pengembangan modul teknis pengisian daya dan perawatan EV guna meningkatkan literasi teknis, serta eksplorasi sumber energi pendukung seperti bioenergi. Seluruh rangkaian tindak lanjut ini diharapkan menjadi masukan konkret bagi penguatan koordinasi dan perumusan kebijakan dekarbonisasi transportasi berbasis baterai di Kemenko Perekonomian.</p> <ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan Rapat Laporan Akhir Kajian Integrasi Rantai Pasok Baterai untuk Transisi Energi di Indonesia pada tanggal 24 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi pembahasan insentif EV, penguatan recycling ecosystem, dan pengembangan strategi <i>stockpiling</i> mineral kritis.• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pengecualian Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas Smelter yang telah Tahap Konstruksi pada tanggal 24 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi tingkat Eselon I untuk menentukan kebutuhan dokumen pendukung dan batas waktu penyampaian dokumen pendukung.• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengecualian Pelaksanaan
--	--	--	--

			<p>PP Nomor 28 Tahun 2025 atas Smelter yang telah Tahap Konstruksi pada tanggal 25 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui arahan untuk melengkapi bukti dukung berupa NIB, Izin Lingkungan, KKPR, dan PBG serta pembentukan Tim untuk verifikasi Perusahaan yang telah masuk dalam tahap konstruksi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Smelter yang mendapat Perizinan Berusaha untuk memproduksi NPI, FeNI, Nickel Matte, dan MHP pada tanggal 4 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi untuk membahas pemberian diskresi bagi smelter yang merupakan satu kesatuan ekosistem rantai pasok grup perusahaan.• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemberian Diskresi atas Smelter memproduksi NPI, FeNI, Nickel Matte, dan MHP yang merupakan Satu Kesatuan Ekosistem Rantai Pasok Grup Perusahaan pada tanggal 5 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi lanjutan untuk menentukan justifikasi dan kriteria pemberian diskresi <i>smelter</i> yang merupakan satu kesatuan rantai pasok dalam grup perusahaan.• Telah dilaksanakan FGD Perspektif Kebijakan dan Industri - Analisis Prospek Pengolahan dan Manufaktur
--	--	--	--

			<p>Baterai Berkelanjutan di Indonesia pada tanggal 8 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui penyelesaian studi oleh tim PYC/KADIN, serta pemanfaatan hasil studi sebagai bahan penguatan koordinasi lintas K/L dalam penyusunan roadmap nasional industri baterai yang terintegrasi dengan agenda hilirisasi mineral, transisi energi, dan strategi investasi. Tindak lanjut difokuskan pada penyesuaian kebijakan industri dan energi, pengembangan peta jalan teknologi pemrosesan dan daur ulang baterai rendah emisi, penguatan kapasitas riset dan SDM, serta perumusan skema pembiayaan hijau yang terkoordinasi. Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk memastikan ketersediaan energi bersih, kepastian regulasi, dan pemenuhan standar keberlanjutan global, sehingga Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri baterai di pasar internasional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan Rapat Progres Gap-Analysis dan Penyusunan Draft Panduan ESG pada tanggal 10 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui penyusunan laporan awal studi gap analisis ESG mineral kritis di Indonesia yang selanjutnya akan disusun pedoman due
--	--	--	---

			<p>diligence ESG mineral kritis di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Telah dilaksanakan Rapat Pengembangan Tata Kelola Timah Nasional pada tanggal 16 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui akan diselenggarakan diskusi lanjutan untuk membahas tata kelola timah nasional untuk meningkatkan industri timah domestik dan menambah daya saing produk hilir timah Indonesia. ● Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pemberian Diskresi atas Smelter yang memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang merupakan Satu Kesatuan Ekosistem Rantai Pasok Grup Perusahaan pada tanggal 22 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi selanjutnya dengan CNGR group dan Kementerian Lembaga terkait. ● Telah dilaksanakan Rapat Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel pada tanggal 22 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui dilakukannya kajian bersama untuk melihat opsi terbaik menghadapi tuntutan EU terhadap Indonesia dalam sengketa DS592. ● Telah dilaksanakan Rapat Relaksasi Pemberlakuan Ketentuan PP No. 28 Tahun 2025 untuk Proyek Pengembangan Ekosistem Industri EV Battery Terintegrasi pada tanggal 30 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui
--	--	--	--

			rapat teknis pemberian diskresi bagi smelter yang telah tahap konstruksi dengan Kemenperin dan Kementerian Hilirisasi dan Investasi/BKPM.
2	Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan hilirisasi industri mineral kritis	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat pada tanggal 19-20 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif lintas kementerian/lembaga untuk memastikan percepatan penyelesaian perizinan, termasuk AMDAL, persetujuan lingkungan, serta penyesuaian ruang lingkup Proyek Strategis Nasional agar mencakup tambang dan <i>hauling road</i>. • Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan limbah baterai ke Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tanggal 23-24 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi terkait dukungan regulasi serta insentif yang dibutuhkan untuk pengembangan industri daur ulang baterai

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Menghadiri FGD Penyusunan Kebijakan Tentang Uji Tuntas HAM Nasional Cakupan Indikator Lingkungan dan Perubahan Iklim pada tanggal 6 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Persiapan OECD Economic Survey Indonesia 2026 pada tanggal 6 Oktober 2025
- Menghadiri Pertemuan terkait Berita Acara Serah Terima (BAST) *KONEKSI – Hibah Riset Electric Vehicle (EV) Mechanism* pada tanggal 8 Oktober 2025
- Menghadiri Capacity Building Workshop IRENA Socio-economic Impact Model for Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2025

- Menghadiri International Process Metallurgy Conference (IPMC) 2025 pada tanggal 14 Oktober 2025
- Menghadiri Workshop on Battery for Electric Vehicle & Energy Storage System pada tanggal 15 Oktober 2025
- Menghadiri FGD Uji Tuntas HAM Nasional Cakupan Indikator Serikat Pekerja pada tanggal 16 Oktober 2025
- Menghadiri FGD Uji Tuntas HAM Nasional Cakupan Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tanggal 17 Oktober 2025
- Menghadiri Diskusi Penentuan Standarisasi Emas di ITS Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2025
- Menghadiri Pertemuan Pengendalian Hibah Riset Electric Vehicle (EV) Program KONEKSI pada tanggal 21 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Deregulasi Pengaturan dan Kebijakan Ekspor pada tanggal 24 Oktober 2025
- Menghadiri Forum Hukum BUMN Pertambangan (FHBP) II pada tanggal 28 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Pembahasan Draft Term of Reference (TOR) OECD Economic Survey of Indonesia 2026 pada tanggal 30 Oktober 2025
- Menghadiri Diskusi dan Pelatihan Bioenergi untuk Ketahanan Energi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan pada tanggal 31 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Internalisasi Perpres No 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
- Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Tata Kelola Emas Nasional pada tanggal 4 November 2025
- Menghadiri Rakortek Pembahasan Rencana Aksi K/L dalam rangka Implementasi Perpres 94 Tahun 2025 pada tanggal 5 November 2025
- Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Proyek Pemurnian Nikel Dalam Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik pada tanggal 5 Desember 2025
- Menghadiri Peluncuran Studi Captive Power: Transisi Energi Bersih pada Pembangkit Listrik Captive untuk Industri pada tanggal 17 Desember 2025
- Menghadiri Rapat HPE Produk Pertambangan Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar Periode II Bulan Desember 2025 pada tanggal 19 Desember 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut telah dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan dalam rangka pengecualian pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas smelter yang telah tahap konstruksi dan diskresi atas smelter dengan produk NPI, FeNI, Nickel Matte, dan MHP yang merupakan satu kesatuan ekosistem rantai pasok grup perusahaan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum optimalnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan hilirisasi mineral kritis, termasuk data teknis dan rencana investasi.

2. Belum tersedia mekanisme pengendalian kebijakan yang terstruktur dan terintegrasi, yang diperlukan untuk memastikan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil rapat koordinasi serta konsistensi pelaksanaan komitmen kementerian/lembaga terkait dalam pengembangan hilirisasi industri mineral kritis khususnya ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis nikel.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2026 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi penyelarasan data dan informasi terkait pasokan bahan baku, kesiapan infrastruktur, serta rencana pengembangan kawasan industri untuk mendukung investasi di sektor hilirisasi mineral kritis.
2. Koordinasi penyusunan rencana aksi pengembangan hilirisasi industri mineral kritis khususnya ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis nikel untuk memastikan tindak lanjut atas kesepakatan dan komitmen kementerian/lembaga terkait.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Daftar pertanyaan survey terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan kepada stakeholders. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit kerja baik Kementerian/Lembaga, BUMN, perusahaan swasta, asosiasi, dan akademisi yang terlibat dalam kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survei}}{\text{Jumlah Item Survei}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan pada tahun 2025 berdasarkan hasil survei adalah 3 dari 4. Penetapan target tahun 2025 dan target semesteran (triwulan II dan IV) didasarkan pada standar minimal layanan yang diberikan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi

Industri Pertambangan yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 4 dari 4 (Sangat Puas) atau mencapai 133,33% (%kinerja maksimal 120%) dari target Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 3 dari 4, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Indeks	3 dari 4	4 dari 4	120%

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan *cascading direct* dari Indikator Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3 dari 4. Survei kepuasan layanan dilaksanakan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Survei ini dilakukan untuk periode semester II tahun 2025 dengan melibatkan 20 responden yang sepanjang periode tersebut menggunakan layanan unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan. Survei ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) pertanyaan skala 1-4 dan 1 (satu) pertanyaan terbuka, meliputi aspek kepuasan penyelenggaraan layanan dan kepuasan substansi layanan, serta kritik dan saran. Kuesioner disebarluaskan secara online dengan menggunakan media *Google Form*.

Berdasarkan hasil survei terhadap 20 responden, rata-rata nilai kepuasan terhadap unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan adalah sebesar 3,925. Mengacu pada ketentuan dalam manual IKU perspektif *customer*, nilai tersebut berada dalam rentang 3,51 hingga 4,00 dan termasuk dalam kategori “**Sangat Puas**”, dengan indeks sebesar 4. Melalui pertanyaan terbuka, para responden juga memberikan sejumlah masukan, di antaranya usulan untuk memperluas pelibatan akademisi, praktisi, dan asosiasi dalam proses koordinasi pada periode mendatang.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Melakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan semester II 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan semester II 2025.
2	Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan semester II 2025	Terlaksana	Telah disusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan semester II 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya korespondensi surat dan komunikasi dengan *stakeholders* melalui platform digital, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp2.500.000. Hasil efisiensi tersebut telah dialokasikan untuk kegiatan koordinasi isu di unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, tidak terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya adalah melaksanakan rekomendasi terhadap hasil survei kepuasan layanan semester II tahun 2025 pada area yang memerlukan peningkatan, serta melaksanakan strategi yang sesuai untuk mencapai kinerja yang lebih baik di periode mendatang. Dengan demikian, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk memastikan tercapainya tujuan serta target kinerja unit kerja.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menpan-RB terkait Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 dan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan:

$$\text{Tingkat implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi dibandingkan tahun sebelumnya dan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang ada. Adapun target triwulan IV ditetapkan sebesar 85%, berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2025.

Hingga triwulan IV tahun 2025, terdapat 6 (enam) dokumen bukti dukung RB yang dihasilkan yaitu Perjanjian Kinerja, Manual Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi, Matriks Peran Hasil, SK Tim Kerja, dan Manajemen Risiko. Dari 6 (enam) dokumen tersebut yang telah diselesaikan sesuai dengan standar sejumlah 6 (enam) dokumen. Sehingga realisasi triwulan IV tahun 2025 sebesar 100% atau kinerja mencapai 118% (%kinerja maksimal 120%) dari target triwulan IV tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Persentase	85	100	118 % (Memuaskan)

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan *cascading indirect* dari indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85%. Dalam mencapai target tersebut, dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana dirinci diuraikan secara rinci pada rencana aksi.

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang pengelolaan kearsipan, berdasarkan Pengumuman Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian nomor TU.04/1/SES.M.EKON/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal, Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan meraih peringkat 5 (lima) pada kategori Unit Pengolah Baru, dengan capaian nilai 95,66 predikat AA (Sangat Memuaskan).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Laporan pelaksanaan rencana aksi RB beserta data dukungannya	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan Rapat Peningkatan Indeks RB General Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 24 Oktober 2025

			<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana aksi RB dan data dukungnya pada 31 Desember 2025
2	Optimalisasi dan implementasi arsip digital melalui SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan optimalisasi dan implementasi persuratan elektronik dan arsip digital melalui SRIKANDI. Hingga triwulan IV 2025, telah diproses sebanyak 184 naskah keluar dan 251 naskah masuk melalui aplikasi SRIKANDI.
3	Pelaporan Narasi Kinerja Triwulan III melalui Ekon-Go	Terlaksana	Telah dilaksanakan pelaporan narasi kinerja triwulan IV beserta dokumen pendukungnya melalui situs web Ekon-Go sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja unit kerja.
4	Pelaporan E-Monev	Terlaksana	Telah dilaksanakan pelaporan capaian output dan realisasi anggaran unit kerja berdasarkan data SP2D sampai dengan triwulan IV melalui aplikasi E-Monev.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Menghadiri Rapat Pemutakhiran Sasaran, Indikator, dan Target Pada Rancangan Renstra Ekon 2025-2029 pada tanggal 2 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Pembahasan Penempatan P3K pada tanggal 3 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Capaian Indikator Sektor ESDM TW III pada tanggal 9 Oktober 2025
- Menghadiri Talkshow World Mental Health pada tanggal 16 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Koordinasi Awal Pengendalian dan Evaluasi RKP pada tanggal 21 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) Anggaran 2025 pada tanggal 21 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Peningkatan Indeks RB General Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 24 Oktober 2025
- Menghadiri Rapat Capaian Indeks Ketahanan Energi s.d Triwulan III 2025 pada tanggal 27 Oktober 2025
- Menghadiri Penilaian Kompetensi ASN melalui kegiatan Profiling ASN (ProASN) pada tanggal 6 November 2025
- Menghadiri Rapat Usulan TUP dan Revisi POK terakhir TA 2025 pada tanggal 17 November 2025
- Menghadiri Sharing Diskusi: Penajaman Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Presiden pada Sektor ESDM Tahun 2026 pada tanggal 19 Desember 2025

- Menghadiri Talkshow “Tanggung Jawab di Dua Arah: Memahami dan Mengelola Tantangan sebagai Sandwich Generation” pada tanggal 23 Desember 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pengurangan penggunaan kertas dengan mengoptimalkan penggunaan dokumen digital dalam persuratan, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp3.500.000. Hasil efisiensi tersebut telah dialokasikan untuk kegiatan yang membutuhkan koordinasi teknis lanjutan pada triwulan IV tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dokumen bukti dukung pelaksanaan Rencana Aksi RB telah sesuai dengan standar.

Jakarta, 13 Januari 2026

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan



Agus Wibowo